



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



**Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat**

BAHASA DAN SASTRA DALAM GUNTINGAN

Perpustakaan Badan Bahasa



Pembina : Sekretaris Badan
Penanggung Jawab : Kepala Subbagian Tata Usaha
Koordinator : Dwi Pudyastuti, S.Pd.
Penyusun : 1. Warsa, S.Pd.
2. Edi Suyanto
Alamat Redaksi : Jalan Daksinapati Barat IV,
Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287/88
Laman : perpustakaan.bahasa.@kemdikbud.go.id

Sekolah Rakyat sonder Esensi Sosdem?

Khairil Azhar

Deputi Akademik Akademi Bela Negara (ABN)
Partai NasDem

MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek? Siapa sesungguhnya yang diandaikan hadir dalam narasi ini dan agenda apa yang sedang dibangun melalui sekolah yang mengatasmakan 'rakyat' tersebut?

Tulisan ini tidak dalam posisi oposisi atau afirmatif, tetapi lahir dari kerangka sosial-demokrasi yang percaya bahwa negara memiliki tanggung jawab penting dalam memperluas keadilan sosial, tetapi bukan dengan mengabaikan partisipasi warga dan otonomi komunitas. Negara bisa menjadi instrumen pembebas, tapi hanya sejauh ia membuka ruang bagi rakyat untuk berpikir, menyuarakan, dan menentukan arah hidup mereka sendiri.

SALAH SATU UPAYA TRANSFORMASI

Tentu saja kita arif bahwa di tengah berbagai tantangan ketimpangan sosial dan pendidikan yang mencolok, proyek sekolah rakyat menjadi salah satu upaya transformasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sederet janji-janji: gratis, berasrama, dan pelayanan penuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sekolah itu terpusat, menjadi ruang pembinaan karakter, nasionalisme, serta keterampilan hidup. Secara normatif, tujuannya mulia: mengentaskan kemiskinan struktural, menyiapkan generasi yang tangguh, dan mempercepat cita-cita besar Indonesia emas 2045.

Anak-anak akan mendapatkan layanan kesehatan berkala, nutrisi yang diawasi, hingga kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kurikulum yang diklaim beragam—dari *deep learning* hingga pelatihan kepemimpinan.

Fasilitas seperti laptop, asrama tiga lantai, dan makanan tiga kali sehari tentu menjadi hal luar biasa bagi keluarga yang selama ini bahkan kesulitan mengakses sekolah negeri biasa.

Alhasil, tak sedikit orangtua, terutama yang hidup di daerah miskin dan terpencil, memandang sekolah ini sebagai satu-satunya jalan realistik bagi anak mereka untuk 'menjadi orang'. Harapan mereka tulus: agar pendidikan bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Namun, di balik kesan impresif itu, pertanyaan mendasar pertama: mengapa dinamai sekolah rakyat?

Dalam sejarah gerakan kemerdekaan dan pendidikan alternatif Indonesia, istilah sekolah rakyat pernah dipakai untuk menandai ruang belajar yang dibangun bersama, oleh komunitas, bagi emansipasi. Kini, ketika istilah itu dihidupkan kembali dalam kerangka birokratis dan teknokratis, kita patut bertanya: apakah nama 'rakyat' tetap menyiratkan pemberdayaan atau hanya menjadi ornamen simbolis dalam kebijakan yang digerakkan dari atas?

Dalam konteks ini, alih-alih menciptakan ruang inklusif, sekolah rakyat pada dasarnya bisa saja berisiko memperkuat garis pemisah sosial. Dengan menempatkan anak-anak miskin dalam satu kompleks asrama khusus, sekolah ini menciptakan batas-batas simbolis yang membedakan mereka dari anak-anak lain.

Sekolah, dengan demikian, bukan lagi tempat penyatuan sosial, melainkan sarana pengelompokan berdasarkan status ekonomi. Terdapat potensi segregasi sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kejiwaan anak—menumbuhkan rasa berbeda, bahkan rendah diri. Stigmatisasi sebagai 'anak miskin' bisa melekat kuat, terutama pada usia remaja yang rentan terhadap identitas sosial dan perlakuan diskriminatif.

Masih secara psikologis, anak-anak dalam usia pertumbuhan memerlukan *nurturance*



atau keterasuhan. Jika anak-anak diasramakan, seberapa jauh pemenuhan kebutuhan mendasar ini terpenuhi? Apakah para pengelola asrama dan guru di sana bisa menjalankan fungsi orangtua yang sebenarnya? Tidak justru, misalnya, ditumpangkan pada pola hirarkis senioritas-junioritas yang mana *bullying* sangat rentan terjadi?

Seiring dengan itu, asrama juga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sering kali menjadi ruang penataan perilaku dan penyeragaman ritual.

Dalam hal ini, asrama bisa saja berfungsi lebih sebagai alat kedisiplinan ketimbang tempat pembelajaran yang membebaskan.

Apa indikasinya? Keterlibatan TNI dalam pelatihan baris-berbaris dan pembinaan karakter, jika tidak dalam takaran psikologis-proporsional, akan berbuah orientasi militeristik dalam membentuk 'anak ideal' versi negara—disiplin, patuh, dan tahan banting. Meski bernama sekolah, ia akan lebih menyerupai lembaga pembinaan sosial sehingga wajar jika kita bertanya: apakah seko-

lah rakyat dibangun demi kelahiran warga negara yang reflektif dan kritis atau sekadar individu yang bisa diatur secara rapi?

Masih dalam konsentrasi yang sama, secara kurikuler, janji akan kurikulum yang inovatif dan progresif lebih lanjut menghadapi tantangan serius: Kurikulum Nasional yang pada dasarnya berbasis standardisasi dan bukan berdasar kearifan lokal. Kini juga ada kerancuan soal metode *deep learning* yang secara teoretis beraksioma murid sebagai agen atau subjek pembelajar telah direduksi sebagai metode yang 'bisa diajarkan' yang mana murid lagi-lagi menjadi 'objek pembelajaran'.

Lalu, tidakkah ini mereproduksi model pendidikan lama yang birokratis, seragam, dan menjadikan anak sebagai objek adaptasi sosial?

Aspek lain yang perlu dipertanyakan: ketergesaan. Renovasi gedung dilakukan terburu-buru-banyak di antaranya ialah bekas pusat rehabilitasi sosial yang tidak dirancang untuk kegiatan belajar anak. Di beberapa wilayah, bangunan bahkan sebelumnya digunakan untuk menampung anak jalanan atau pemulihan pecandu narkoba.

Proses transisi sumber daya fisik ini mencerminkan cacat lain: ketiadaan dialog publik yang memadai, nyaris tanpa keterlibatan masyarakat lokal, dan seakan-akan pendidikan bisa disusun layaknya proyek infrastruktur biasa.

Polanya juga seperti *charity-based*—memberi kepada 'yang tidak punya'—tapi dengan cara yang hierarkis, tertutup, dan sentralistik. Karena itu, selain perkara tentang siapa yang memberi, juga tentang siapa yang didengar dalam merancang masa

depan pendidikan anak-anak.

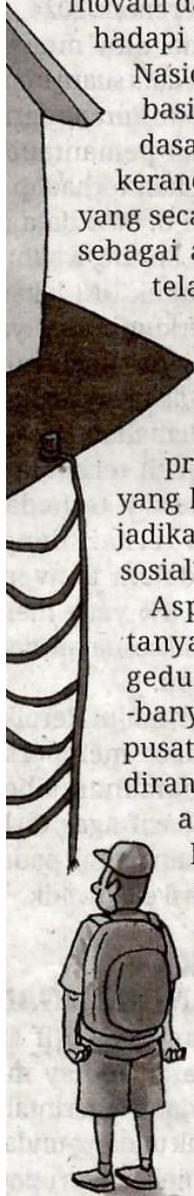
EFEKTIVITAS DAN PRIORITAS

Sementara itu, dengan anggaran sebesar Rp1,19 triliun untuk tahun pelajaran pertama dan target pembangunan 500 titik sekolah rakyat, proyek ini tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan soal efektivitas dan prioritas. Di tengah krisis fasilitas dasar di banyak sekolah negeri, terutama di tingkat kelurahan dan desa, wajar jika publik bertanya: mengapa tidak memperkuat sekolah-sekolah yang sudah ada? Mengapa memilih membangun sistem baru yang eksklusif alih-alih memperbaiki yang struktural? Apakah investasi ini demi menciptakan keadilan sosial atau justru lebih condong pada pencitraan dan pembingkai politik jangka pendek?

Kembali kepada parameter sosial-demokratik. Kita perlu ingat bahwa pendidikan ialah alat emansipasi sosial. Ia bekerja untuk mengeluarkan individu dari kemiskinan laten dan fungsional, memampukan warga menjadi subjek sosial yang sadar dan partisipatif. Pendidikan seperti ini tidak bisa dibangun di atas pendekatan yang mengasingkan komunitas dari proses. Ia harus lahir dari dialog, dari pengalaman lokal, dari kepercayaan bahwa rakyat tidak hanya layak menerima, tapi juga layak menentukan.

Jika tidak demikian, ia hanya akan menjadi instrumen teknokratis yang kehilangan jiwa. Alih-alih menjadi sekolah emansipatoris, ia berisiko menjadi ruang reproduksi ketimpangan yang dibungkus dengan niat baik.

Karena itu, meskipun tak bisa dikatakan harapan belumlah pupus, sekolah rakyat masih menyimpan potensi, yakni jika ia bersedia mendekonstruksi dirinya sendiri: menjadi ruang belajar yang betul-betul berakar pada kerakyatan—peka terhadap konteks sosial, budaya, dan realitas psikologis muridnya; sekolah yang menempatkan guru sebagai pendidik reflektif, bukan lagi robot pelaksana kebijakan dan kurikulum; dan di atas itu semua memanusiakan manusia.



Guru-guru Harus Beradaptasi dengan Perubahan Kurikulum

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan menteri baru yang menetapkan penyesuaian pada Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pendidikan nasional disambut hangat para guru. Mereka berharap aturan ini tidak sekadar asal berbeda dengan kebijakan menteri sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengatakan, kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sudah tepat. Sebab, kurikulum memang tidak perlu diganti, tetapi cukup dengan menguatkan pendekatan pembelajaran mendalam pada kurikulum yang ada.

Menurut dia, Kurikulum Merdeka belum aplikatif untuk diterapkan di Indonesia. PGRI menilai banyak murid kini ke sekolah, tetapi tidak mengerti apa yang dipelajarinya di sekolah.

"Dulu, kan, mekanisme reformasi kurikulum itu saya pikir terlalu gegabah sehingga belum waktunya direformasi secara fundamental. Akan tetapi, langsung dilakukan reformasi fundamental. Jadilah Kurikulum Merdeka yang tidak merdeka," kata Dudung di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

PGRI mendorong Kemendikdasmen segera menyosialisasikan sederet aturan baru agar para guru bisa segera menerapkannya. Setiap guru harus mampu memberikan pembelajaran mendalam yang tidak hanya sekadar menghafal, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

"Pelatihannya jangan hanya untuk guru-guru tertentu seperti dulu yang hanya diprioritaskan guru penggerak sehingga banyak masalah di sekolah. Guru belum paham, belum mengerti, tetapi wajib mengimplementasikan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YGC) Muhammad Mukhlisin menyoroti perubahan aturan ini yang tergolong cepat. Aturan ini menggantikan Permen Nomor 12 Tahun 2024 yang ditandatangani menteri sebelumnya, Nadiem

Deep learning yang joyful, meaningful, dan mindful itu dari dulu sebenarnya guru-guru sudah melakukan, hanya saja sekarang mungkin diformalkan dalam aturan.

Anwar Makarim, tentang penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pendidikan nasional.

Aturan ini juga disertai penggunaan istilah-istilah baru yang belum memiliki pijakan operasional yang jelas. Hal ini berpotensi menambah beban psikologis dan administratif bagi guru.

"Dalam praktiknya, guru tidak hanya menghadapi tantangan pedagogis, tetapi juga harus menavigasi berbagai kebijakan yang kerap berubah tanpa pendampingan yang memadai," kata Mukhlisin.

Selain itu, perubahan standar kompetensi lulusan dari "Profil Pelajar Pancasila" menjadi "Profil Lulusan" terkesan hanya mengganti nama saja dan dirumuskan tanpa mekanisme partisipatif yang melibatkan komunitas pendidikan secara luas. Padahal, keberlanjutan dan legitimasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada proses penyusunannya yang inklusif dan jangka panjang.

"Profil lulusan semestinya menjadi hasil konsensus nasional lintas pemangku kepentingan, bukan sekadar produk teknokratik yang rawan ditinggalkan saat terjadi pergantian kekuasaan," ujarnya.

Perkuat implementasi

Meski demikian, perubahan kebijakan ini, kata Mukhlisin, sudah cukup baik karena menyesuaikan praktik pendidikan dengan perkembangan zaman. Ini terlihat pada upaya menguatkan literasi digital, seperti pengenalan kecakapan koding dan AI.

Oleh karena itu, YGC mendesak pemerintah tidak hanya

mengubah aturan, tetapi juga harus serius dalam implementasinya. Sebab, di banyak daerah, guru masih kebingungan akibat informasi simpang siur dan minimnya pendampingan.

Asis Bin Wahid, guru di SD Negeri 008 Mentarang Hulu, Desa Lung Kebinu, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, merasa tidak ada perbedaan signifikan dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum yang baru diterbitkan. Dia menilai aturan ini sudah banyak diterapkan para guru.

"Deep learning yang joyful, meaningful, dan mindful itu dari dulu sebenarnya guru-guru sudah melakukan, hanya saja sekarang mungkin diformalkan dalam aturan. Jadi, ini tak ada yang berubah sebenarnya," kata Asis.

Terkait penerapan mata pelajaran pilihan koding dan AI, Asis merasa butuh pendampingan pemerintah. Sebab, guru di daerah terluar kesulitan mengajarkan koding dan AI karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Permendikdasmen No 13/2025 tidak mengubah substansi dua kurikulum yang berlaku, tetapi sebagai penyesuaian administratif dan penguatan arah kebijakan pendidikan. Di dalamnya memperkuat implementasi dua kurikulum itu melalui penyesuaian bentuk dan struktur kegiatan kokurikuler.

Pendekatan pembelajaran diperkuat dengan mendorong pembelajaran mendalam berfokus pada pemahaman konsep menyeluruh, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta refleksi proses belajar. Kegiatan kokurikuler didesain lebih integratif dengan pembelajaran tematik dan berbasis proyek guna meningkatkan keterkaitan antara pengetahuan dan praktik nyata.

"Saya menegaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 ini bukan tentang kurikulum baru. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan kita," kata Mu'ti pada Selasa (22/7). (TIO)

Beri Pengakuan dan Apresiasi Pustakawan

► Pemerintah Tetapkan Tanggal 7 Juli sebagai Hari Pustakawan

PEMERINTAH menetapkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Pustakawan. Penetapan Hari Pustakawan ini juga menindaklanjuti hasil Kongres XV Ikatan Pustakawan Indonesia pada 1-4 November 2022 di Surabaya.

Kini sudah resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 81/M/2025 pada tanggal 25 Juni 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan mengatakan, penetapan hari itu hanya untuk dijadikan momentum reflektif menguatkan komitmen terhadap pengelolaan perpustakaan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Hari Pustakawan Indonesia bukan merupakan hari libur nasional," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Menurut Mu'ti, penetapan hari tersebut sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas dedikasi para pustakawan di seluruh Tanah Air.

"Mengingat peran strategis pustakawan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui akses ilmu pengetahuan

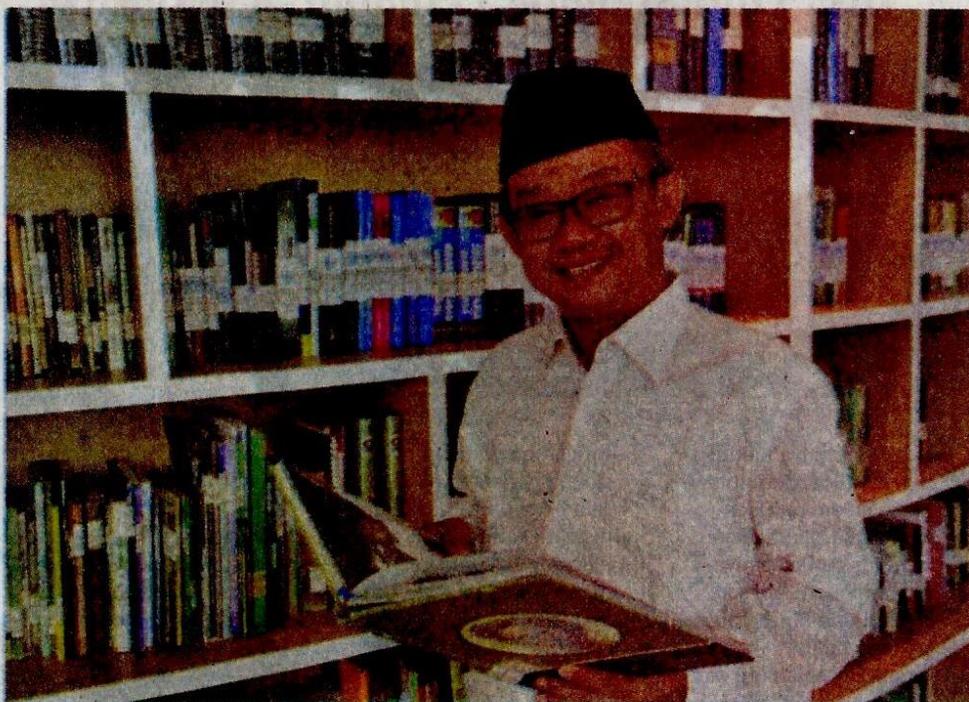
penguatan, kemampuan literasi informasi, pembangunan karakter, dan peradaban bangsa," kata Mu'ti.

Selain itu, penetapan Hari Pustakawan ini juga diharapkan mendorong profesionalisme pustakawan dalam menunjang pembelajaran sepanjang hayat.

Mu'ti melanjutkan, penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan dan literasi serta mengapresiasi kontribusi pustakawan sebagai garda depan dalam pengelolaan informasi dan penguatan budaya literasi.

Oleh karena itu, Kemendikdasmen mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, komunitas pendidikan, penggiat literasi. Maupun masyarakat luas untuk menjadikan Hari Pustakawan Indonesia sebagai tonggak untuk memperkuat ekosistem literasi nasional.

"Momentum ini diharapkan menjadi pemacu semangat pustakawan Indonesia untuk terus berinovasi dan menginspirasi bangsa," ujar Mu'ti. ([Kompas.com](https://www.kompas.com)/[Sania Mashabi](https://www.kompas.com))



Kompas.com/Singih Wiryono

Hari Pantun Ditetapkan Setiap 17 Desember

JAKARTA, KOMPAS — Pantun sebagai salah satu tradisi lisan yang dimiliki Indonesia kian tidak asing dalam kehidupan masyarakat, terutama menjadi bagian dalam acara-acara resmi ataupun tidak resmi. Pantun sebagai warisan budaya tak benda, yang juga diakui UNESCO, harus terus dilestarikan.

Pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada sesi ke-15 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage pada 17 Desember 2020. Nominasi pantun diajukan bersama Indonesia dan Malaysia.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menetapkan Hari Pantun setiap 17 Desember. Ditegaskan pula Hari Pantun bukan merupakan hari libur. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 163/M/2025 tentang Pantun yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 7 Juli 2025.

Pertimbangan penetapan Hari Pantun karena pantun merupakan perwujudan kearifan lokal bangsa Indonesia yang menggambarkan sistem nilai, pandangan hidup, dan tata etika masyarakat. Penetapan pantun sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO menjadi daya ungkit untuk peningkatan pantun menjadi alat komunikasi sosial dan pemanfaatan pantun dalam kegiatan kesenian dan ekonomi kreatif.

Penetapan Hari Pantun sebagai upaya melestarikan keberadaan pantun sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, dalam rangka membangun pemahaman semua pemangku kepentingan dan untuk memublikasikan upaya pelestarian dan pendayagunaan pantun.

Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pudentia MPSS di Jakarta, Kamis (10/7/2025), mengapresiasi keputusan pemerintah menetapkan Hari Pantun secara nasional. "Waktu ATL mengutarakan usulan pantun diutamakan untuk menjadi warisan budaya tak benda, sempat di kalangan akademisi ada yang skeptis, apa bisa pantun menjadi warisan budaya tak benda dunia. Namun, kami melihat pantun ini unik dan bermakna," katanya.

Menurut Pudentia, pantun yang menjadi keseharian tradisi masyarakat Melayu kini dapat berkembang, bahkan di kalangan generasi muda. Ada "permainan" bahasa yang menarik untuk bisa merangkai kata-kata indah, tetapi bermakna, dan menyampaikan pesan.

Budaya sopan santun

Pudentia mengatakan, dengan mengembangkan budaya berpantun, juga bisa kembali mengokohkan budaya sopan santun dalam berkomunikasi. Di dalam pantun bisa disampaikan arahan, pesan, kritik, kemarahan, dan kejengkelan, tanpa menyinggung pihak lain, atau tanpa harus mengumpat.

"Di dalam pantun tersimpan potensi yang tidak hanya tentang nilai estetika yang tinggi, tetapi juga nilai komunikasi yang tinggi," ujar Pudentia yang juga guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Pudentia menambahkan, pengembangan pantun juga dapat mendorong penggunaan kosakata bahasa Indonesia. Generasi muda pun akan semakin cerdas menggunakan beragam kosakata yang dimiliki bangsa ini sehingga semakin membuka pikiran, kepekaan, dan kepedulian dengan imaji kosakata dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

"Pantun itu indah dan bermakna. Ini menarik untuk dirangkai dan dipelajari. Dengan peringatan Hari Pantun, berarti warisan budaya lisan ini menjadi warisan kita dan menjadi bagian hidup kita," ujar Pudentia.

Tetap hidup dan relevan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen dalam pelestarian sastra lisan bangsa. Salah satunya terlibat aktif dalam kegiatan Memperkasa Pantun Nusantara Ke-4 Tahun 2025 pada Mei lalu.

Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan, pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia memegang peranan penting dalam menumbuhkan karakter. Badan Bahasa secara konsisten menerapkan pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk memasyarakatkan pantun kepada generasi muda.

"Fokus utama kami adalah memastikan bahwa pantun tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Pengakuan UNESCO terhadap pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia menjadi landasan kokoh untuk melanjutkan upaya pelestarian ini. Pantun menjadi karya sastra yang dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai dan karakter," kata Hafidz.

Lebih lanjut, Hafidz menegaskan, Festival Pantun Nusantara ini sebagai sarana strategis untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap tradisi lisan, khususnya di kalangan generasi muda. Kegiatan lintas negara seperti ini juga memperluas jejaring budaya dan memperkokoh kerja sama internasional dalam bidang kebahasaan dan kesastraan.

"Dengan kolaborasi lintas negara dan lintas generasi, pantun tidak hanya lestari, tetapi juga mengalami revitalisasi bentuk dan makna. Melalui forum ini, warisan budaya yang dahulu lisan kini menggaung di panggung global," kata Hafidz. (ELN)

Kurikulum Merdeka Tetap Berlaku

[Sambungan dari halaman 1]

untuk penyesuaian terhadap standar nasional pendidikan, istilah "Profil Pelajar Pancasila" yang sebelumnya dilaksanakan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) diubah menjadi "Profil Lulusan". Ini sejalan dengan penyesuaian pada standar kompetensi lulusan (SKL).

Profil Lulusan difokuskan untuk mencapai delapan dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tujuannya, menumbuhkembangkan lulusan dengan jiwa kepemimpinan yang efektif, berintegritas, profesional, dan transformatif. Semua ini harus dimiliki setiap murid setelah lulus.

"Jadi, kegiatan (P5) tetap ada, hanya namanya yang ti-

dak kita gunakan kembali. Kami tidak mengganti nama, yang ada adalah program kurikuler. Kami ubah dari enam ditambah dua menjadi delapan profil lulusan. Jadi, ada dua dimensi yang baru, yaitu kesehatan dan komunikasi," kata Laksmi.

Pramuka wajib

Sementara untuk memperkuat pendidikan karakter pada murid, kegiatan kepanduan seperti Pramuka kini ditetapkan sebagai bagian wajib dari pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Langkah ini bertujuan menumbuhkan semangat kemandirian, kepemimpinan, dan gotong royong pada diri peserta didik.

"Satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus menyediakan ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya," ujar Laksmi.

Salah satu hal yang disoroti

pemerhati pendidikan terkait kebijakan pendidikan dasar menengah di bawah Mu'ti adalah munculnya beberapa istilah atau diksi baru. Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo, awal Mei lalu.

Saat itu, ia menilai, di masa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang lalu, ada istilah Profil Pelajar Pancasila, Tiga Besar Dosa Pendidikan, dan Guru Penggerak. Kini muncul lagi beragam program dan istilah baru yang perlu dipahami lagi dan diterapkan guru.

"Sayangnya, istilah-istilah menarik itu belum tentu mencerminkan roh dari diksi yang dipilih. Akhirnya, guru tetap menjadi obyek pendidikan. Ini jauh dari apa yang selama ini didengungkan bahwa kita menitipkan masa depan pada guru," kata Henny (*Kompas*, 2/5/2025). (TIO)

Poin-poin Kebijakan Kurikulum Pendidikan

- **Tidak ada perubahan kurikulum**
Kerangka dasar kurikulum masih menggunakan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 sebagai acuan.
- **Penerapan pembelajaran mendalam**
Pendekatan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari kerangka dasar kurikulum. (Pasal 3)
- **Penyesuaian bentuk, kompetensi, dan muatan pembelajaran kokurikuler**
Penyederhanaan aktivitas, pengurangan waktu sesuai jenjang, integrasi lintas disiplin, dan berbasis proyek. Prinsip kurikulum juga menekankan pengembangan karakter, fleksibilitas, dan relevansi lokal. (Pasal 16)
- **Penambahan mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial**
Koding dan kecerdasan artifisial sebagai muatan pilihan. Mulai akan berlaku pada tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap untuk kelas 5-6 SD, SMP (kelas 7, 8, 9), dan SMA (kelas 10, 11, 12). (Pasal 32A)
- **Pengaturan tentang penyediaan kegiatan ekstrakurikuler**
Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal wajib menyelenggarakan layanan ekstrakurikuler dan minimal harus menyediakan satu kegiatan berbasis kependuan, seperti Pramuka. (Pasal 22)

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 13/2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 12/2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Diolah Litbang Kompas/RTA

Pacu Jalur, Ruang untuk Populerkan Bahasa Daerah

Pradipta Pandu

Beberapa waktu terakhir, budaya lokal pacu jalur kian dikenal luas tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga mancanegara. Ke-populeran pacu jalur tidak terlepas dari viralnya gerakan tari seorang anak lelaki bernama Rayyan Arkhan Dikha yang berdiri di haluan dengan gaya unik hingga memunculkan tren *aura farming* di media sosial.

Dalam bahasa daerah, "pacu" berarti lomba, sedangkan "jalur" adalah perahu panjang. Jadi, pacu jalur adalah perlombaan perahu tradisional dayung sampan atau kano panjang khas Rantau Kuantan yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Peneliti Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Fauziyah Marifat, menjelaskan, pada hakikatnya pacu jalur merupakan pesta rakyat dengan filosofi kebersamaan dan gotong royong. Semangat gotong royong tecermin dari awal proses pembuatan hingga pelaksanaan lomba di arena pacu.

"Dalam bahasa daerah, semangat kebersamaan ini dikenal sebagai *parari*, yakni bekerja bersama tanpa pamrih atau upah. Tujuannya, mewujudkan perahu yang baik dan bisa menang dalam lomba," ujarnya dalam diskusi daring bertajuk "Populerkan Bahasa Daerah melalui Budaya

Lokal Pacu Jalur", Jumat (25/7/2025).

Tahapan pembuatan perahu pacu jalur dimulai ketika sebuah kampung di Kuantan Singingi memutuskan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Warga akan bermusyawarah atau berembuk untuk menyampaikan keinginan mereka dan meminta bantuan kepada seorang yang disebut pawang guna menentukan lokasi pohon yang tepat.

Pohon untuk bahan pembuatan perahu umumnya berbentuk lurus dan memiliki panjang 20-40 meter. Pawang juga yang menentukan waktu penebangan pohon tersebut.

Menurut Devi, tradisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menebang pohon bukan diambil sembarangan oleh masyarakat, melainkan berdasarkan petunjuk dari orang yang dipercaya. Setelah waktu dan tempat penebangan ditentukan, warga akan datang beramai-ramai ke lokasi untuk melakukan ritual sebelum pohon ditebang.

Prosesi melayur jalur

Setelah perahu selesai dibuat, dilakukanlah prosesi *melayur jalur*, yaitu ritual khusus yang biasanya dilaksanakan malam hari dan dihadiri pejabat daerah, termasuk bupati. Momen *melayur jalur* menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendekatkan diri dengan pemimpin daerah dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Pembuat jalur bukanlah

orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk masyarakat karena memiliki keahlian khusus. Selain itu, pembuatan jalur juga dibiayai bukan hanya oleh masyarakat, melainkan turut didukung para tokoh kampung atau pemuka masyarakat," kata Devi.

Tahapan berikutnya, pengecatan dan pemberian nama perahu. Pengecatan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keterampilan, dengan motif yang disesuaikan dengan kehendak masyarakat. Nama jalur biasanya dipilih berdasarkan pengalaman saat proses pembuatan atau kondisi alam saat penebangan pohon.

Banyak nama jalur yang unik, seperti "Tudung Kuantan"—dinamai demikian karena saat menebang pohon ditemukan ular tudung di hutan. Kemudian terdapat juga nama "Elang Sakti" karena saat menebang datang burung elang yang dianggap pertanda baik. Jadi, nama jalur selalu memiliki cerita dan makna tersendiri.

Setelah dicat dan diberi nama, perahu kemudian dicoba diturunkan ke sungai. Proses ini juga dilakukan secara gotong royong. Kini, penurunan perahu sering kali dibantu alat untuk meringankan pekerjaan.

Bahasa daerah

Ajang tradisi tahunan pacu jalur yang kian populer bukan hanya panggung adu kecepatan perahu tradisional. Lebih dari itu, pacu jalur menjadi ruang

hidup yang kaya ekspresi budaya, termasuk untuk mempopulerkan bahasa daerah masyarakat Kuantan.

Dalam pacu jalur, sejumlah bahasa daerah atau istilah khas yang lekat dengan budaya setempat kembali menggema, seperti *melayur jalur*, *togak lu-an*, *timbo ruang*, dan *tukang onjai*. Kata-kata ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian tak terpisahkan dari narasi serta tradisi pacu jalur yang sarat nilai dan makna.

Contohnya, *togak aluan* yang merupakan istilah untuk anak yang berdiri di haluan. Umumnya, mereka berusia 9-12 tahun dengan berat badan ringan agar tidak membebani perahu dan memiliki keterampilan menjaga keseimbangan. Fungsinya ialah menari atau bergoyang di ujung perahu untuk menyemangati para anak pacu.

Selain itu, ada juga posisi penting lain yang disebut *timbo ruang*. *Timbo* berasal dari kata *menimba*, yakni mengambil air dari dalam perahu. Saat perlombaan berlangsung, gerakan cepat anak pacu bisa menyebabkan air masuk ke dalam perahu. Tugas *timbo ruang* adalah menimba dan membuang air tersebut agar tidak mengganggu kecepatan laju perahu.

Di bagian belakang perahu terdapat sosok penting lainnya, yaitu *tukang onjai* yang bertugas mengatur arah perahu. Ia berdiri di buritan dan menyesuaikan arah dengan cara menginjak atau menggeser ba-

hidup yang kaya ekspresi budaya, termasuk untuk memopulerkan bahasa daerah masyarakat Kuantan.

Dalam pacu jalur, sejumlah bahasa daerah atau istilah khas yang lekat dengan budaya setempat kembali menggema, seperti *melayur jalur*, *togak luan*, *timbo ruang*, dan *tukang onjai*. Kata-kata ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian tak terpisahkan dari narasi serta tradisi pacu jalur yang sarat nilai dan makna.

Contohnya, *togak aluan* yang merupakan istilah untuk anak yang berdiri di haluan. Umumnya, mereka berusia 9-12 tahun dengan berat badan ringan agar tidak membebani perahu dan memiliki keterampilan menjaga keseimbangan. Fungsinya ialah menari atau bergoyang di ujung perahu untuk menyemangati para anak pacu.

Selain itu, ada juga posisi penting lain yang disebut *timbo ruang*. *Timbo* berasal dari kata *menimba*, yakni mengambil air dari dalam perahu. Saat perlombaan berlangsung, gerakan cepat anak pacu bisa menyebabkan air masuk ke dalam perahu. Tugas *timbo ruang* adalah menimba dan membuang air tersebut agar tidak mengganggu kecepatan laju perahu.

Di bagian belakang perahu terdapat sosok penting lainnya, yaitu *tukang onjai* yang bertugas mengatur arah perahu. Ia berdiri di buritan dan menyesuaikan arah dengan cara menginjak atau menggeser ba-

gian belakang perahu. *Tukang onjai* harus memastikan perahu tetap berada di jalur yang benar dan tepat hingga mencapai garis akhir.

Devi menyebut, bahasa-bahasa daerah seperti ini bisa populer kembali jika masyarakat mau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat lokal juga tidak perlu merasa bahwa bahasa lokal daerah tersebut merupakan bahasa yang tertinggal.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, pacu jalur merupakan perlombaan sekaligus tradisi yang berbasis budaya dan sudah mendapatkan status warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2015. Warisan budaya ini diharapkan terus berlanjut dari generasi ke generasi karena pacu jalur memiliki aspek olahraga, seni, serta ekonomi.

Fadli pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan pacu jalur masuk sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebab, selama ini pacu jalur diketahui sebagai kearifan lokal Indonesia yang memiliki daya saing dan daya tarik tinggi di mata dunia.

"Memang antrean cukup banyak, tetapi ini merupakan bagian dari tradisi budaya yang panjang ratusan tahun. Kita harapkan bisa kita perjuangkan, kita buat kajian, naskah akademik, serta *dossier*. Dengan informasi yang ada, akan lebih mudah untuk kita daftarkan menjadi warisan budaya tak benda dunia," katanya.

Manfaatkan Koding dan AI untuk Kemanusiaan

JAKARTA, KOMPAS — Mata pelajaran koding dan kecerdasan buatan banyak diminati murid karena mereka tertarik membuat gim. Pemerintah berharap pelajaran koding menghasilkan karya konkret yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, generasi muda harus bisa berimajinasi dan berinovasi melalui pembelajaran koding. Esensi pembelajaran koding yang mendorong kemampuan berpikir komputasional harus lebih ditekankan.

"Koding tidak boleh semakin memperlebar ketimpangan. Justru melalui koding, kita membuat ketimpangan itu semakin tipis," kata Pratikno dalam peluncuran Program UOB My Digital Space yang berkolaborasi dengan Ruangguru di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ia menegaskan, penguasaan teknologi harus diarahkan pada manfaat yang luas. Melalui belajar koding, murid bisa berkontribusi, seperti membantu petani memprediksi iklim, mendeteksi buah yang sakit, dan membuat pemupukan

lebih efektif.

Melalui akal imitasi (AI), murid bisa membuat program yang membantu aksesibilitas aktivitas ataupun komunikasi bagi penyandang disabilitas atau mendukung nelayan dalam membaca risiko cuaca dan ombak di laut.

Salah satu siswa yang sudah menerapkan hal ini adalah Rajendra Verrill Hafizha dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, yang membuat program Indonesian Sign Language Interpreter. Program berbasis koding dan AI ini membantu para penyandang disabilitas rungu dan wicara berkomunikasi secara virtual.

Tak hanya Verrill, Agatha Christelle Mikaella Aridono, anak kelas 2 di SD Katolik Sang Timur Cakung pun bisa membuat gim sederhana, Independence Day Traditional Gamers, setelah belajar koding. Ada pula gim Roaring Dino yang dibuat Athariq Alifcakra Malangjoedo dari Hanifa Islamic School dan Zero Hunger oleh Pijar Manggala Shtiladitya dari SD Kreativitas Anak Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, kemampuan menguasai koding dan AI ada-

lah sebuah keniscayaan. Dia mengutip laporan World Economic Forum (WEF) 2025 yang menyatakan bahwa salah satu kemampuan utama yang diminati pekerjaan pada 2030 adalah penguasaan koding dan AI.

"Koding bukan sekadar teknologi, melainkan juga tentang kemampuan menggunakan logika dan analitis serta berpikir kritis dan kreatif sebagai bagian dari kompetensi kita. Kompetensi ini sungguh sangat penting bagi keberlanjutan kita di masa depan," kata Mu'ti.

Penyelenggaraan pelajaran koding dan AI bukan hanya dilakukan pemerintah. Dalam kesempatan ini, UOB bersama Ruangguru memberikan akses kepada 90.000 pelajar di Indonesia agar belajar koding dan AI bernama program UOB My Digital Space.

Selama lima tahun, mereka yang diutamakan berasal dari keluarga kurang mampu akan dibekali dengan perangkat dan kurikulum yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan komputasional. Setiap tahun, akan terjangkau siswa di 500 sekolah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia. (TIO)

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

Cecep Darmawan

Guru Besar dan Dekan FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia

PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan. Anehnya, Sri Mulyani yang notabene paham persoalan anggaran malah seakan melempar bola panas soal gaji guru dan dosen yang dianggap masih rendah. Alih-alih menaikkan gaji guru-dosen, Sri Mulyani meminta partisipasi masyarakat untuk mengatasinya.

Meski pemerintah mengalokasikan dana pendidikan Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, nyatanya 44,2% anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun. Jika dititik dari proporsi tersebut, anggaran riil untuk operasional dan investasi pendidikan tentu menjadi berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Idealnya anggaran untuk MBG dipisahkan atau dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan.

TIDAK BERBANDING LURUS DENGAN MUTU

Di atas kertas, anggaran yang fantastis itu menarasikan komitmen penuh negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sayangnya, di balik besarnya angka tersebut, tersembunyi kenyataan yang memprihatkan. Anggaran yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan potret mutu pendidikan Indonesia yang cenderung jalan di tempat, tertinggal daya saingnya dengan negara lain, dan sarat ketimpangan atau disparitas yang begitu tajam.

Dengan kata lain, proporsi anggaran pendidikan tidak menavigasi sistem anggaran yang ideal. Alih-alih berdampak pada kualita-

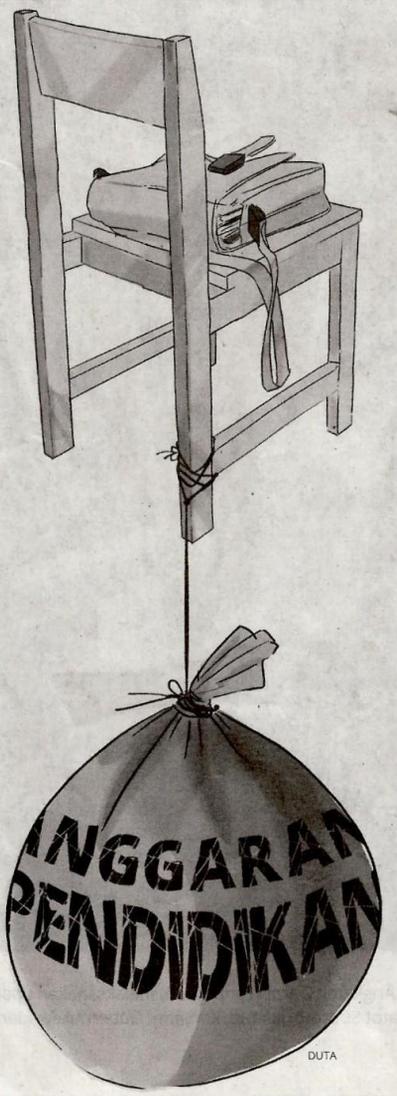
tas, kualitas pendidikan Indonesia kerap menjadi persoalan serius.

Berdasarkan *Human Development Report 2025* yang diterbitkan UNDP (2025), ranking indeks pembangunan manusia Indonesia masih menempati posisi ke-113 dengan skor 0,728. Rangkings itu masih di bawah Thailand di posisi ke-76 dengan skor 0,798, lalu Malaysia di posisi ke-67 dengan skor 0,819, dan Singapura di posisi ke-13 dengan skor 0,946.

Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 pun, skor Indonesia juga relatif tertinggal dari negara tetangga. Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan rata-rata skor PISA sebesar 369 poin. Skor itu masih di bawah Thailand dengan skor rata-rata 394, lalu Malaysia dengan skor rata-rata 404, kemudian Vietnam dengan skor rata-rata 468, dan Singapura dengan skor 560.

Selain itu, indeks makropendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu yang relatif rendah dan ketimpangan antarwilayah yang masih relatif tinggi. Berdasarkan data BPS RI (2024), angka rata-rata lama sekolah (RLS) Indonesia sebesar 8,85 atau dapat dikatakan hampir lulus dengan SMP. Begitu pun dengan angka harapan lama sekolah (HLS) Indonesia berdasarkan data BPS RI (2024) masih sebesar 13,21 atau dapat dikatakan baru memiliki peluang menamatkan pendidikan formal setara dengan diploma satu (D-1).

Lebih parah lagi BPS RI (2024) melansir angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) di Indonesia pada 2024 masih begitu rendah, yakni sebesar 32,00. Artinya hampir dua pertiga dapat dipastikan tiap tahun lulusan SLTA di Indonesia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, data di atas dapat memberikan kesan bahwa anggaran pendidikan yang besar itu tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan yang baik.



“Dibutuhkan *political will* yang kuat dari Presiden Republik Indonesia untuk membenahi kesengkarutan anggaran pendidikan nasional di Indonesia. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.”

PRIORITAS YANG KABUR

Dengan demikian, muncul pertanyaan mengapa anggaran yang besar itu belum menghasilkan mutu pendidikan yang baik? Hal itu disebabkan anggaran yang idealnya menjadi tulang punggung perbaikan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia justru terjebak dalam hitung-hitungan politis, tata kelola yang lemah, dan prioritas yang kabur.

Pemerintah pusat selalu mengklaim patuh pada konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Namun, bila diperiksa, sebagian besar anggaran itu justru digunakan untuk membiayai pendidikan kedinasan pada kementerian/ lembaga yang secara jelas dikecualikan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Di sisi lain, Kemendikdasmen dan Kemendikti-Saintek hanya mengelola sebagian kecil dari porsi 20% anggaran pendidikan nasional dari APBN sehingga ruang untuk peningkatan kualitas melalui kebijakan strategis menjadi terbatas.

Di samping itu, anggaran pendidikan pun menghadapi beban fiskal yang begitu besar dengan adanya program-program baru dari pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperkenalkan sejumlah program baru yang menyedot anggaran besar, tetapi tidak diarahkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat misalnya, meski penting untuk mengatasi malagizi dan putus sekolah, berpotensi menjadi beban fiskal yang besar tanpa desain kebijakan yang tepat dan integrasi dengan program pendidikan nasional.

SOLUSI

Pemerintah dan DPR semestinya menavigasi anggaran pendidikan dengan menggunakan model penganggaran pendidikan selain taat asas pada regulasi, juga memperhatikan berbagai pendekatan seperti *evidence based policy*, *regulatory impact analysis* (RIA), *corruption risk analysis* (crisis), dan mendorong partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).

Hal itu menjadi penting agar penganggaran pendidikan tidak berbasis pada tarik ulur kepentingan elite penguasa dan pragmatisme. Oleh karena itu, perlu *refocusing* peruntukan anggaran pendidikan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan hanya memperluas akses. Prioritas penggunaan anggaran pendidikan harus mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Selain itu, dibutuhkan *political will* yang kuat dari Presiden Republik Indonesia untuk membenahi kesengkarutan anggaran pendidikan nasional di Indonesia. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Jika situasi itu dibiarkan, sama saja dengan kita tengah menyusun rancang bangun kegagalan pendidikan nasional secara sistemis sejak awal perencanaan penganggarnya.

Banyak Perpustakaan Tak Dikelola Pustakawan

JAKARTA, KOMPAS — Pustakawan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan literasi. Sayangnya, masih banyak perpustakaan di Indonesia tidak dikelola oleh pustakawan. Alhasil, jutaan bahan bacaan yang tersimpan di perpustakaan kurang dimanfaatkan secara optimal.

Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) T Syamsul Bahri mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 164.000 perpustakaan di Tanah Air. Jenisnya beragam, mulai dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga perpustakaan milik instansi pemerintah dan swasta.

Sementara jumlah pustakawan atau petugas yang kompeten mengelola perpustakaan kurang dari 20.000 orang. "Kita kekurangan pustakawan," ujarnya di sela-sela peringatan Hari Pustakawan Indonesia dan Hari Ulang Tahun Ke-52 IPI di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Senin (7/7/2025).

Menurut Syamsul, masih banyak perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan, dalam artian petugas yang memiliki kemampuan teknis, standar kerja, dan pedoman mengelola perpustakaan secara optimal.

Syamsul menyadari keterbatasan pemerintah dalam merekrut pustakawan profesional. Alhasil, sejumlah perpustakaan dikelola pegawai atau petugas yang tidak memiliki kemampuan khusus bidang perpustakaan. Di sekolah-sekolah, misalnya, guru diberdayakan sebagai petugas perpustakaan.

Padahal, mengelola perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki beberapa kemampuan teknis. Kemampuan yang diperlukan bukan cuma menata buku, melainkan juga keterampilan katalogisasi, klasifikasi, pengelolaan koleksi, analisis data, dan pemanfaatan teknologi informasi demi memaksimalkan layanan perpustakaan.

Terkait hal itu, pihaknya terus mendorong pemerintah



KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (tengah) menghadiri peringatan Hari Pustakawan Indonesia dan Hari Ulang Tahun Ke-52 Ikatan Pustakawan Indonesia di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (7/7/2025).

merekrut pustakawan untuk mengelola perpustakaan secara profesional.

Menurut Syamsul, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan pustakawan. Pemerintah, misalnya, menggelar beberapa pelatihan bagi tenaga perpustakaan. Ada juga program sukarelawan literasi yang tak hanya fokus pada perpustakaan, tetapi juga taman bacaan masyarakat.

"IPI juga dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan itu. Ini merupakan salah satu cara di samping terus mengupayakan formasi (perekrutan pegawai) pustakawan bisa terus bertambah," ungkapnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menuturkan, kekurangan pustakawan merupakan tantangan yang harus dijawab bersama dengan melibatkan banyak pihak. Program studi perpustakaan di perguruan tinggi perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan itu.

"Bekerja di perpustakaan itu

profesi yang tidak terkenal dan nyaris tanpa publikasi. Sering disebut bekerja di tengah sunyi," katanya.

Menurut Mu'ti, dibutuhkan keberpihakan pemerintah untuk mengangkat pustakawan sebagai bagian dari tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, formasi pustakawan dalam perekrutan pegawai di daerah-daerah juga perlu ditambah.

"Kementerian kami dulu hanya mempunyai balai guru penggerak. Sekarang, namanya diubah menjadi balai guru dan tenaga kependidikan. Jadi, yang diurus bukan hanya guru, melainkan juga tenaga kependidikan, termasuk pustakawan," ujarnya.

Hari Pustakawan

Pemerintah telah menetapkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Penetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 81/M/2025. Hal ini merupakan bentuk pengakuan dan apre-

siasi atas dedikasi pustakawan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

"Penetapan itu merupakan momentum penting yang menegaskan komitmen pemerintah mendukung pustakawan sebagai profesi. Kedua, berusaha menjadikan kebiasaan membaca dan perpustakaan sebagai bagian dari membangun bangsa yang cerdas dan membangun peradaban," tutur Mu'ti.

Kepala Perpustakaan Nasional E Aminudin Aziz menyampaikan, penetapan Hari Pustakawan Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah kepustakawanan. Selain karena pustakawan diakui sebagai profesi, hal ini juga menjadi refleksi untuk terlibat dalam pembangunan bangsa, terutama di bidang literasi.

"Pustakawan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimanapun, perpustakaan adalah wahana ketika ilmu pengetahuan dan kreativitas bisa dikembangkan," ucapnya. (TAM)

Buku Berperan Penting Penuhi Hak Pendidikan

- *Membaca adalah cara mencapai atau wadah untuk mendapatkan pengetahuan.*
- *Para founding father kita sangat mencintai buku.*
- *Buku berkualitas rendah atau konten tidak edukatif masih beredar.*

DESPIAN NURHIDAYAT

despian@mediaindonesia.com

SAAT ini realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia ialah rendahnya tingkat literasi. Meskipun meningkat, kegairahan membaca saat ini masih di bawah rata-rata.

“Belum lagi berbagai permasalahan yang sekarang dihadapi oleh para penulis, seperti minimnya royalti, kemudian pajak penghasilan bagi penulis, dan di satu sisi buku ini sendiri juga masih menjadi barang yang mahal,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) bertajuk Tata Kelola Pengetahuan dan RUU Buku di Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut, menurut Rerie, isu perbukuan harusnya menjadi perhatian penting dan isu perbukuan adalah instrumen untuk memenuhi hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dia menekankan bahwa buku dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan penting dalam pemenuhan hak pendidikan.

WADAH PENGETAHUAN

Membaca sejatinya adalah cara mencapai atau menjadi wadah untuk mendapatkan pengetahuan.

“Membaca buku tidak hanya melatih fokus dan meningkatkan kinerja otak, tetapi juga sebuah cara bagaimana seorang individu bisa berdialog dengan apa yang dibacanya dan memungkinkan dia untuk lebih memahami dunia secara lebih luas. Mampu menganalisis bahkan menyanggah dan mempertanyakan informasi yang diserapnya melalui buku yang dibaca. Buku sebenarnya adalah alat untuk memberikan jalan kepada anak bangsa untuk bisa mengasah ketajaman pikiran, dan muaranya tentu kecerdasan,” papar Rerie.

MENCERDASKAN

Di tempat yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus pengusul RUU tentang Perbukuan, Willy Aditya, menegaskan bahwa jika bertolak pada konstitusi Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, semestinya hal tersebut menjadi sebuah misi yang sangat suci. “Kalau kita sangkutkan dengan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, maka peran

buku itu sangat intim. Seperti Bung Karno itu membaca 363 buku, dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa di hari-hari Bung Karno. Ketika kita merdeka, itu lahir dari ruang diskursus karena buku adalah ruang antara membaca dan menulis,” ucap Willy.

“Lalu juga pernah terjadi keributan antara Syahrir dan Hatta ketika dijemput untuk pulang. Hatta membawa berkoper-koper buku dan itu ditandang oleh Syahrir karena Syahrir lebih memilih untuk menyelamatkan orang. Jadi kita bisa melihat para *founding father* sangat mencintai buku,” sambungnya.

KUALITAS BUKU

Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji menambahkan bahwa kelemahan implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ialah aturannya komprehensif, tetapi implementasinya lemah di lapangan, terutama dalam pengawasan kualitas buku dan distribusi. Kondisi itu berdampak pada sulitnya buku bermutu menjangkau daerah terpencil, sementara buku berkualitas rendah atau konten tidak edukatif masih beredar.

Aturan ini juga dikatakan hanya menyebut kewajiban pemerintah untuk meningkatkan literasi, tetapi tanpa strategi konkret seperti anggaran dan monitoring. Dengan begitu, program seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sering bersifat seremonial tanpa dampak nyata pada kebiasaan membaca. (H-1)